

SENGKETA NUKLIR IRAN – AMERIKA SERIKAT

Adirini Pujayanti

7

Abstrak

Sengketa nuklir Iran-Amerika Serikat (AS) kembali terjadi setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan negaranya mundur dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dan memberlakukan sanksi ekonomi yang ketat terhadap Iran. Sanksi AS berlaku secara luas, karena negara-negara yang bertransaksi ekonomi dengan Iran akan turut mendapat sanksi ekonomi dari AS. AS beralih bahwa Iran mengganggu stabilitas Timur Tengah. Iran mengancam akan mencabut sebagian komitmennya dalam JCPOA, jika negara-negara penandatanganan lainnya tidak mampu melindungi Iran dari sanksi ekonomi AS. Ancaman Iran tersebut ditanggapi AS dengan pengerahan pasukan militer AS ke Timur Tengah yang menyebabkan situasi di kawasan Teluk memanas dan dikhawatirkan dapat terjadi konflik terbuka antara Iran dan AS. Dalam situasi mengarah kepada konflik terbuka tersebut, masyarakat internasional, melalui PBB dan organisasi kawasan, perlu menekankan solusi damai melalui dialog agar keamanan kawasan Timur Tengah kembali aman. Hal tersebut akan dibahas dan menjadi fokus tulisan singkat ini.

Pendahuluan

Sengketa nuklir AS-Iran memanas setelah AS mengerahkan pasukan tempurnya ke Timur Tengah menanggapi ancaman Iran akan keluar dari kesepakatan *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) atau dikenal sebagai Kesepakatan Nuklir 2015. Iran menyatakan armada perang AS akan menjadi target bila intervensi AS dianggap mengganggu wilayah dan kewenangan Iran. Iran juga mengancam akan melanjutkan program pengayaan uraniumnya jika kesepakatan baru dengan pihak-pihak yang masih terikat

dalam JCPOA, yaitu lima anggota Dewan Keamanan (DK) PBB ditambah Jerman dan Uni Eropa, tidak segera dilakukan. JCPOA telah terancam gagal karena pengunduran diri sepihak AS di tahun 2018 yang diikuti tekanan politik dan sanksi ekonomi negara adi daya tersebut kepada Iran. Saat ini Iran tidak memaparkan pada tahap apa negaranya dalam pengayaan uranium. Jika Iran telah melewati proses pengayaan uranium tingkat tinggi, uranium tersebut dapat digunakan untuk senjata nuklir.

Presiden Iran Hasan Rouhani



menyatakan kondisi ekonomi Iran saat ini lebih berat dari masa perang Iran-Irak pada tahun 1980-an. Iran meminta masyarakat internasional serta negara-negara penandatangan kesepakatan yang masih tersisa untuk menjaga kesepakatan nuklir 2015 dengan segera memulihkan hubungan ekonomi dengan negaranya. Iran menyatakan negara tersebut tidak akan sepenuhnya keluar dari perjanjian nuklir 2015, hanya khusus pada bab 26 dan 36 yang memang mengizinkan Iran mengambil langkah tertentu jika salah satu pihak menarik diri dari kesepakatan nuklir tersebut. Surat penarikan diri Iran akan memberikan waktu dua bulan kepada Uni Eropa untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka sebelum Iran mengambil langkah lebih lanjut. Uni Eropa menjanjikan mekanisme keuangan baru, perdagangan obat dan komoditas kemanusiaan lainnya, dan menghindari sanksi sekunder AS.

Berbagai ancaman Presiden Trump terhadap Iran telah meningkatkan ketegangan di wilayah Teluk Persia. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat internasional akan kemungkinan pecahnya perang terbuka atau terbatas AS-Iran di Teluk Persia. Kondisi tersebut akan mengganggu pasokan minyak dan melonjaknya harga minyak dunia. Melihat situasi yang berkembang dalam sengketa nuklir Iran- AS yang pasti akan berdampak global, masyarakat internasional tidak dapat berdiam diri untuk membantu mencari solusi damai dengan mencegah terjadinya konflik nuklir Iran-AS. Tulisan ini membahas bagaimana seharusnya masyarakat internasional menyikapi persoalan ini.

Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) adalah kesepakatan dengan imbalan pencabutan sanksi terhadap Iran. Dalam perjanjian yang digagas bersama AS, Iran, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, China dan Uni Eropa, Iran telah menurunkan pengayaan uraniumnya dan berjanji tidak akan mengembangkan senjata nuklir untuk menghapus sanksi internasional. Kesepakatan ini pada intinya menghentikan program pengembangan nuklir Iran, di mana Iran akan diawasi tim pemantau nuklir PBB dari *International Atomic Energy Agency (IAEA)*.

Dalam kesepakatan nuklir 2015, Iran hanya boleh memiliki 300 kilogram uranium dibanding sebelumnya yakni 100.000 kilogram (*Kompas*, 16/5/2019). Iran hanya bisa memperkaya uranium hingga 3,67% yang hanya bisa digunakan untuk energi namun jauh dari 90% yang dibutuhkan untuk senjata nuklir (*Kompas*, 16/5/2019). Perjanjian juga membatasi kepemilikan fasilitas pengurai Iran dan hanya pada fasilitas tua yang menguraikan uranium lebih lama. Iran juga harus menyusun ulang reaktor airnya agar tidak bisa memproduksi plutonium dan sepakat mengalihkan situs pengayaan Fordo yang terletak di pegunungan terpencil, agar dialihkan ke pusat riset. Tim inspeksi dari IAEA juga harus mendapat akses ke fasilitas nuklir Iran. Pembatasan ini akan diganti dengan penghapusan sanksi ekonomi yang mengucilkan Iran dari perbankan dan perdagangan minyak dunia. Aset Iran yang senilai miliaran dolar AS di luar negeri akan dikembalikan dan Iran diizinkan membeli pesawat terbang komersial serta melakukan

kesepakatan bisnis dengan perusahaan luar.

Selama kesepakatan berlangsung, IAEA mengatakan bahwa Iran telah mematuhi poin perjanjian nuklir 2015 dengan membatasi aktivitas nuklirnya. Iran menyatakan penggunaan nuklirnya hanya untuk energi sipil semata. Laporan yang dikeluarkan IAEA, seperti dilaporkan Aljazeera, 23 Februari 2019, Iran membatasi pengayaan uranium pada tingkatan yang disepakati sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani di Wina, Austria, pada 2015.

Kebijakan Presiden AS Donald Trump

Hubungan Iran-AS mencapai titik terendah setelah Presiden AS Donald Trump pada 8 Mei 2018 secara sepihak menarik AS dari JCPOA. AS kembali menerapkan sanksi ekonomi bertahap terhadap Iran yang telah menyebabkan krisis ekonomi di Iran. AS secara bertahap menjatuhkan sanksi ekonomi meliputi sektor otomotif, logam mulia, bahan makanan dan perdagangan. Sanksi tahap kedua, meliputi sektor migas dan bank sentral. Akibat sanksi tersebut nilai mata uang Iran jatuh lebih dari 100% yang memicu kenaikan harga barang yang signifikan. Sanksi-sanksi AS tersebut bertujuan untuk mendorong rakyat menggulingkan rezim Iran.

Pada tahap ketiga, karena sanksi sebelumnya dianggap belum efektif, AS menghentikan dispensasi pada negara-negara yang sebelumnya dibolehkan mengimpor minyak Iran agar ekspor minyak Iran menjadi nol, sehingga Iran tidak memiliki sumber pendapatan utama. AS terus bergerak secara agresif

dengan mengancam dan memblokir akses pasar AS pada perusahaan-perusahaan Eropa yang terus melakukan bisnis dengan Iran. Layanan telekomunikasi perusahaan milik Iran terganggu dan kontrak asuransi dibatalkan.

Presiden AS Donald Trump, memandang perjanjian nuklir 2015 merupakan kesepakatan terburuk. Karena menurut Trump, perjanjian tersebut tidak menyertakan larangan program rudal balistik Iran atau dukungan Teheran terhadap kelompok Hizbullah dan Presiden Bashar Al-Assad di Suriah. Perjanjian ini tidak membatasi uji coba rudal serta memiliki batas waktu. Misalnya, Iran dalam 8,5 tahun bisa menguji 30 pengurai uranium yang lebih maju, jumlah ini bisa bertambah dalam 2 tahun ke depan (*Tempo.co*, 10/5/2019). Iran bisa melanggar perjanjian dan kembali membuat bom nuklir setelah masa perjanjian habis. Oleh karena itu, pemerintahan Trump mengajukan 12 syarat baru bagi perundingan kembali JCPOA, di antaranya Iran harus mundur dari Irak, Suriah, dan Lebanon. Iran juga diminta untuk membuka akses tanpa batas untuk pemeriksaan seluruh situs nuklir dan militer, dan menghentikan terorisme di seluruh dunia. Iran menolak karena menilai persyaratan tersebut tidak realistis.

Ketegangan kian meningkat setelah AS mengirimkan gugus tempurnya ke Timur Tengah atas masukan dinas intelijen Israel, Mossad. AS diyakinkan bahwa ancaman terbesar saat ini berasal dari loyalis Iran yang tersebar di beberapa negara, terutama milisi Hashid Shaabi di Irak dengan anggota 193.000 personel bersenjata lengkap. Terdapat pula milisi-

milisi kecil yang diperkirakan berjumlah 20.000 personel (*Kompas*, 14/5/2019). Pemerintah AS telah menghimbau warganya untuk tidak melakukan kunjungan ke Irak saat ini. AS juga memberikan peringatan kepada kapal-kapal komersialnya untuk menghubungi AL AS dua hari sebelum berlayar ke Selat Hormuz.

Sikap Masyarakat Internasional

Kondisi Teluk Persia semakin mengkhawatirkan setelah dua tanker Arab Saudi menuju AS diserang pihak tidak dikenal di lepas pantai Pelabuhan Fujairah yang terletak di ujung Selat Hormuz, selat sempit yang memisahkan Iran dengan rivalnya di kawasan Teluk. Selat tersebut dilalui kapal-kapal tanker yang membawa minyak hingga 174 juta barel perhari atau setara seperlima pasokan global. Hampir semua ekspor minyak Arab Saudi, Irak, UEA, Kuwait, Qatar, dan Iran sendiri dikirim melalui Selat Hormuz. Serangan dan sabotase kapal tanker merupakan ancaman berbahaya bagi keselamatan navigasi dan memberikan pengaruh negatif terhadap keamanan kawasan.

Masyarakat internasional memperhatikan dengan cemas konflik AS-Iran yang dapat mengganggu stabilitas kawasan negara-negara penghasil minyak dunia. Arab Saudi menyerukan pembicaraan regional darurat, dan mengundang para pemimpin Teluk dan negara anggota Liga Arab dalam pertemuan darurat. Eropa belum satu suara dan relatif lemah terhadap isu sengketa nuklir Iran, namun mereka berharap Iran tidak melakukan pelanggaran terhadap JCPOA atau terpaksa

turut menjatuhkan sanksi terhadap Iran. China menolak sanksi sepihak, menyerukan agar semua pihak tetap berkomitmen menegakkan kesepakatan dan membuka dialog. Rusia menyalahkan kebijakan AS sebagai provokasi yang menyebabkan Iran menarik diri dari kesepakatan.

Pemerintah Indonesia telah menyesalkan langkah AS menarik diri dari JCPOA di tahun 2018. Kebijakan unilateral AS tersebut menyulitkan Iran dalam melaksanakan JCPOA, yang merupakan capaian penting diplomasi yang dapat berkontribusi dalam mendorong non-proliferasi senjata nuklir dan penciptaan perdamaian serta stabilitas kawasan dunia. Indonesia berharap dapat tercipta situasi kondusif untuk membantu mencari penyelesaian konflik dan krisis di Timur Tengah. Dalam menghadapi tekanan politik dan sanksi ekonomi AS, di tahun 2018 Iran pernah meminta bantuan Indonesia untuk mendukungnya terkait sikap AS yang keluar dari perjanjian tersebut.

Menghadapi sengketa AS- Iran terkait isu nuklir yang berdampak pada stabilitas keamanan di Timur Tengah, masyarakat internasional harus mencegah setiap pihak yang akan merusak keamanan dan keselamatan maritim di Selat Hormuz karena berdampak pada stabilitas harga minyak dunia. Untuk itu masyarakat internasional perlu bekerja sama mempertahankan kesepakatan nuklir 2015 tetap berjalan demi perdamaian dan keamanan dunia.

Kesepakatan tersebut menegaskan hak setiap negara untuk memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai sebagaimana dijamin oleh Traktat NPT. Tercapainya kesepakatan 2015 tersebut merupakan

bukti efektivitas pemecahan masalah melalui cara damai yang mengedepankan jalur diplomasi dan dialog. Masyarakat internasional perlu mendesak PBB untuk terlibat menyelesaikan isu ini dengan menghimbau pihak-pihak yang terkait dapat tetap melanjutkan pendekatan yang konstruktif dalam mengimplementasikan kesepakatan dimaksud. DK PBB juga perlu bekerja sama dengan organisasi negara-negara kawasan, seperti Liga Arab dan Uni Eropa, untuk lebih terlibat secara intens mencari solusi masalah ini.

Indonesia yang menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020, dan memegang presidensi DK PBB selama bulan Mei 2019, sudah seharusnya secara aktif mengangkat masalah ini dan mencari solusinya bersama dengan anggota DK PBB yang lain dalam sidang DK PBB. Kebijakan Indonesia terhadap kesepakatan nuklir 2015 menjadi dasar dalam mencari solusi masalah ini, meski hal ini tidak mudah karena selalu ada upaya beberapa negara untuk memudahkan multilateralisme dan menggantinya dengan unilateralisme. Oleh karena itu, Indonesia perlu berupaya menciptakan sinergi antara organisasi kawasan dan PBB, dan bekerja sama dengan berbagai pihak yang sejalan untuk mencari penyelesaian damai melalui dialog. DPR RI, melalui diplomasi parlemennya, sudah tentu juga perlu mendukung upaya damai dalam sengketa nuklir Iran-AS ini.

Penutup

Sengketa nuklir Iran-AS yang belum kunjung berakhir tidak saja menjadi persoalan bagi hubungan

kedua negara tersebut, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan internasional ketika kedua negara memilih cara militer untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Masyarakat internasional, termasuk Indonesia yang saat ini menduduki kursi keanggotaan di DK PBB, tidak boleh tinggal diam, tetapi perlu terus mengawal dan menjadi bagian dari solusi damai dalam sengketa nuklir Iran-AS. Keanggotaan Indonesia dalam DK PBB adalah peluang untuk memperlihatkan integritas Indonesia sebagai negara non-blok dan dapat menjadi tumpuan harapan negara non-blok lainnya untuk memperoleh perlakuan adil. Dukungan DPR terhadap kebijakan Pemerintah dan posisi Indonesia di DK PBB sangat diperlukan dalam upaya mencari solusi damai bagi sengketa nuklir Iran- AS saat ini.

Referensi

- Apa Isi Perjanjian Nuklir Iran yang Ditolak Amerika Serikat?, (tempo.co,10/05/2018), <https://www.teras.id/news/pat-2/59839/apa-isi-perjanjian-nuklir-iran-yang-ditolak-amerika-serikat>, diakses 20 Mei 2019.
- "AS Kembali Jatuhkan Sanksi ke Iran", *Republika*, 10 Mei 2019, hal. 7.
- "AS Mundur dari Kesepakatan Nuklir Iran, Begini Sikap Indonesia, (10 Mei 2018), <https://kabar24.bisnis.com/read/20180510/19/793632/as-mundur-dari-kesepakatan-nuklir-iran-begini-sikap-indonesia>, diakses 10 Mei 2019.
- "AS Keluar dari Perjanjian Nuklir, Iran Minta Dukungan Indonesia", <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/11/18292051/as-keluar-dari-perjanjian-nuklir>

- iran-minta-dukkungan-indonesia.
diakses 10 Mei 2019
- “Donald Trump Ancam Iran berakhir”,
Media Indonesia, 21 Mei 2019, hal.
21.
- “Eropa Desak AS-Iran Redakan
Ketegangan”, *Kompas*, 15 Mei
2019, hal. 5.
- “Iran Bedah Kesepakatan Nuklir”,
Republika, 9 Mei 2019, hal. 7.
- “Iran Tidak Ingin Perang”, *Kompas*, 16
Mei 2019, hal. 8.
- “Kekuatan Senjata Ditambah”, *Media
Indonesia*, 12 Mei 2019, hal. 2.
- “Mossad di Balik Gerakan Militer AS
ke Teluk Persia”, *Kompas*, 14 Mei
2019, hal. 8.
- “Pengawas PBB Sebut Iran Patuhi
Pokok Perjanjian Nuklir 2015”,
(23 Februari 2019), [https://](https://dunia.tempo.co/read/1178781/pengawas-pbb-sebut-iran-patuhi-pokok-perjanjian-nuklir-2015/full&view=ok)
- dunia.tempo.co/read/1178781/
pengawas-pbb-sebut-iran-patuhi-
pokok-perjanjian-nuklir-2015/
full&view=ok, diakses 10 Mei
2019.
- Retno Marsudi, “Indonesia dan Dewan
Keamanan PBB”, *Kompas*, 15 Mei
2019, hal. 7.
- Rouhani: Ini Lebih Berat dari Perang
Iran-Irak”, *Media Indonesia*, 13 Mei
2019, hal. 7.
- Smith Alhadar, “Potensi Perang Iran-
AS”, *Kompas*, 13 Mei 2019, hal. 7.
- “Teluk Semakin Memanas”, *Kompas*, 14
Mei 2019, hal. 8.



Adirini Pujayanti
adirini.pujayanti@dpr.go.id

Dra. Adirini Pujayanti, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional, Universitas Nasional pada tahun 1992 dan pendidikan program Magister (S2) Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia pada tahun 2002. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Masalah-Masalah Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Kebijakan Luar Negeri Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan dan Manfaatnya Bagi Indonesia” (2015), “Parlemen dan Interfaith Dialogue: Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan dan Perdamaian Dunia” (2015), “Diplomasi Ekonomi Bidang Perdagangan Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo” (2015), dan “Ekonomi Kreatif sebagai Nation Brand Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN” (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.